

Menunggu Legislator

Equator

Minggu, 19 Juni 2011

Ketapang

Di balik megaprojek Riam Merasap, banyak hal belum terungkap. Posisi kasus masih samar-samar. Padahal banyak pihak mengharapkan pengungkapan faktanya.

PONTIANAK. Agar tak terkesan tumpul dalam mengkritisi persoalan di daerahnya, anggota DPRD Ketapang disarankan proaktif dalam menyikapi mega proyek air bersih Riam Merasap Kabupaten Ketapang yang delapan tahun tak kunjung berfungsi.

"Kita harapkan DPRD Ketapang bisa lebih proaktif menelusuri dugaan korupsi ini," tutur N CH Saiyan SH MH, anggota DPRD Kalbar bidang Hukum dan Pemerintahan kepada Equator, tadi malam (18/6).

Sebagai sesama legislator, Saiyan menilai, sikap proaktif DPRD Ketapang sangat diperlukan demi mengungkap posisi kasus apakah benar terjadi korupsi atau tidak.

Kondisi ini, ujar dia, erat kaitannya dengan sikap Kejati Kalbar yang menghentikan pengumpulan data kasus itu, dengan alasan belum menemukan kerugian Negara sesuai kesimpulan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar.

"Saya pikir tidak ada salahnya DPRD Ketapang secara kelembagaan meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan audit ulang.

Bukan kita tidak percaya dengan BPKP, tapi ini diperlukan demi kejelasan kasus tersebut," sarannya.

BPK memiliki kewenangan dalam melakukan audit penggunaan keuangan Negara oleh pemerintah, mulai tingkat pusat hingga daerah. Kewenangan ini diatur jelas dalam berbagai undang-undang tentang BPK.

Dalam memeriksa penggunaan keuangan negara, ada berbagai jenis audit yang dilakukan BPK. Ada yang berupa audit regular atau audit yang lazim dilakukan tiap akhir tahun anggaran, serta audit khusus yang berdasarkan permintaan dari aparat hukum atau DPRD.

Jika permintaan audit datang dari aparat hukum, BPK bisa menyetujui dan bisa juga menolak (jika dirasakan tidak perlu dilakukan audit). Namun jika permintaan audit datang dari DPRD, BPK mutlak melakukan audit.

"Karena itu, kita mendorong DPRD Kabupaten Ketapang minta BPK melakukan audit. Ini sebagai salah satu perwujudan mereka dalam menjalankan fungsi penga-

Nasdem Bertekad

Menunggu Legislator wasan," seru Saiyan.

Legislator partai Demokrat tersebut juga berharap Kejati Kalbar kembali meneliti kasus itu. "Kita minta Kejati tidak hanya menerima laporan diatas kertas saja. Coba turunkan tim ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara fisik," ucapnya.

Saiyan menegaskan, apa yang disampaikannya tersebut bukan sebagai bentuk untuk mengintervensi aparat penegak hukum atau DPRD Ketapang. Sebaliknya, hal-hal tersebut justru untuk masukan bagi aparat yang ada.

"Supaya jangan sampai ada kecurigaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kalau memang dari hasil pemantauan di lapangan tidak merugikan secara fisik, silakan diputuskan apakah perlu dilanjutkan proses hukumnya atau tidak," tukas Saiyan.

Seperti diketahui, sorotan kepada proyek Riam Merasap Ketapang itu sudah sering dimunculkan berbagai pihak mulai warga di sekitar lokasi proyek, tokoh masyarakat hingga legislator setempat. Kejari Ketapang juga menyerahkan soal ini ke Kejati.

Namun Kejati menganggap

hanya pada tataran pengumpulan bahan keterangan alias Pulbaket. Tiba-tiba saja Arifin Arsyad SH, Kepala Seksi Penyerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasi Penkum dan Humas) Kejati Kalbar menyatakan proses hukum dugaan korupsi Riam Merasap dihentikan.

Karuan saja hal ini menimbulkan banyak tanda tanya. Dalih penghentian itu bahkan dianggap pembohongan publik. "Kita kaget dan heran membaca berita, kalau dugaan kasus korupsi pembangunan air bersih Riam Merasap sudah dihentikan Kejaksaan Tinggi

.... . dari halaman 1

(Kejati) Kalbar, berdalih tak ada kerugian negara. Bohong! Negara tak dirugikan," tegas Herman Wimpy, Ketua Front Pembela Merah Putih distrik Ketapang yang menghubungi redaksi Equator, Jumat (18/6) sore.

Wimpy mempertanyakan uang proyek Rp 125 hingga 135 miliar itu. Lagi pula masih banyak warga Ketapang kesusahan air bersih. Proyek sejak tahun 2003 dan selesai 2009 itu menelan uang rakyat sangat besar, namun air bersih bagi warga Ketapang dan sekitarnya belum terpenuhi. (bdu)